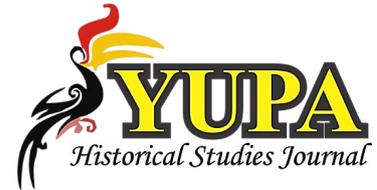


P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754

Yupa: Historical Studies Journal

Vol. 6 No. 1, 2022 (1-17)

<http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>



Gejolak Sosial di Bima Tahun 1972 Era Orde Baru (Melacak Akar Historis)

Aksa

UIN Alauddin Makassar, Indonesia
aksa131288@gmail.com

Received	Accepted	Published
01/01/2022	13/07/2022	10/08/2022

Abstract This paper describes the background of the problem of the emergence of social turmoil in 1972 in Bima. This social upheaval was initiated by the Donggo people, better known as the 'Donggo Event 1972. The method used is the historical writing method which consists of four stages, including; heuristics, source criticism (verification), interpretation and historiography. The results of the study showed that the attitudes and policies of the New Order regime which tended to be repressive, authoritarian, and militaristic, raised critical awareness of the Donggo people to sue the ruling regime. Historically, mass lawsuits against the New Order regime at the local level were born because of Dou Donggo's romance with Jena Teke Abdul Kahir II (Crown Prince of Sultan Muhammad Salahuddin. Abdul Kahir II is considered successful in developing the Bima area with his cultural approach when he became Jeneli Donggo. Other factors which is no less important because of the existence of the Donggo Bima Jakarta Student Association (IPMDB-Jakarta) as a gathering place for intellectual actors who designed the mass movement that gave birth to the social movement in Bima in 1972.

Keywords: Social Upheaval, New Order, Bima

Abstrak Tulisan ini mendeskripsikan seputar latar permasalahan munculnya gejolak sosial tahun 1972 di Bima. Gejolak sosial ini diinisiasi oleh masyarakat Donggo yang lebih dikenal dengan istilah 'Peristiwa Donggo 1972. Metode yang digunakan yaitu metode penulisan sejarah yang terdiri dari empat tahapan, antara lain; heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sikap dan kebijakan rezim Orde Baru yang cenderung represif, otoritarian, dan militeristik memunculkan kesadaran kritis dari masyarakat Donggo untuk menggugat rezim yang berkuasa. Secara historis, gugatan massa atas rezim Orde Baru di tingkat lokal lahir karena adanya romantisme Dou Donggo dengan Jena Teke Abdul Kahir II (Putera Mahkota dari Sultan Muhammad Salahuddin. Abdul Kahir II dianggap berhasil membangun daerah Bima dengan pendekatan kulturalnya ketika menjadi Jeneli Donggo. Faktor lain yang tidak kalah penting karena adanya organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Donggo Bima Jakarta (IPMDB-Jakarta) sebagai tempat berkumpulnya aktor-aktor intelektual yang mendesain gerakan massa sehingga melahirkan gerakan sosial di Bima tahun 1972.

Kata kunci : Gejolak Sosial, Orde Baru, Bima



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kalangan militer sudah terlibat dalam bidang politik yang cukup besar sejak masa awal revolusi Nasional. Keterlibatan militer di bidang politik saat itu karena adanya penerapan keadaan berbahaya dengan terbentuknya pemerintahan yang totalitarian militeristik. Setelah Agresi Militer Belanda II (Kolonial Belanda menyebutnya aksi polisionil, yaitu mengamankan Negara dari makar para pemberontak), peran Militer yang signifikan dalam mempertahankan Negara didasarkan pada UU No.30/1948 yang memberi wewenang komandan militer sebagai penguasa darurat, termasuk mengangkat gubernur militer dan bupati militer di wilayah Republik Indonesia (Said, 1992: 101-104).

Keterlibatan militer masa Orde Baru menurut Haryono, bukanlah warisan dari masa revolusi serta kegagalan kaum politisi dalam menjalankan pemerintahannya. Namun, keterlibatan mereka merupakan hasil dialektika masyarakat Indonesia setelah pengakuan kedaulatan Belanda yang memungkinkan militer, dapat menjadi pengendali aktivitas partai politik dan pelaku politik. Sebagai pengendali aktivitas partai politik, militer selalu membatasi dan mengawasi aktivitas partai-partai politik dan kegiatan berpolitik masyarakat. Sedangkan sebagai pelaku politik, militer masuk ke dalam jajaran kabinet sampai terjadinya proses perubahan rezim yang berhasil mengesahkan dominasi militer dalam bidang politik. Kemampuan militer khususnya Angkatan Darat, sebagai pengendali aktivitas partai politik dan pelaku politik dimungkinkan dengan adanya penerapan keadaan bahaya dan rentannya politisi sipil dalam bersinergi untuk membangun tatanan demokrasi (Haryono dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lopian, 2012: 466).

Orde Baru tetap menghendaki adanya partai politik, akan tetapi partai politik yang tidak mengancam stabilitas dan ABRI. Dalam seminar Angkatan Darat di Bandung pada bulan Agustus 1966, telah berkembang dua pemikiran yakni, ada yang menginginkan dua partai dan ada pula yang menghendaki model partai seperti negara-negara yang ada di benua Eropa. Berkenaan dengan partai politik, Orde Baru tidak mungkin menghilangkan eksistensi partai politik karena alasan-alasan seperti, Pertama. Ia harus memelihara peran partai untuk mewakili para pengikut tradisionalnya. Kedua, karena banyak pendukung partai yang bukan berasal dari kalangan Islam, maka diperlukan partai untuk untuk mengimbangi kekuatan umat Islam (Crouch, 1997: 177-191).

Kedudukan militer Era Orde Baru memperoleh posisi yang istimewa lagi menguntungkan, sebab pemerintah telah menyiapkan 100 kursi khusus dalam parlemen untuk mewakili aspirasi golongan Militer (Fraksi ABRI). Monopoli kekuasaan Soeharto semakin kokoh karena adanya dukungan dari kalangan militer sehingga dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat. Lagi pula di daerah-daerah yang jauh dari pusat amat mudah bagi pihak tentara untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya (Boland, 1985: 156). Sementara dalam

mematikan langkah politik lawan-lawannya, Soeharto menolak rehabilitasi partai Masyumi, membatasi partai-partai yang bersifat aspiratif ideologis dan 'membonsai' partai politik ke dalam dua partai saja.

Partai-partai berhaluan Islam (Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (Partai NU), Partai Muslimin Indonesia dan (Parmusi), Partai Islam (Parti) digabungkan dalam partai berlambang Ka'bah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 5 Januari 1973. Sedangkan Partai-partai yang berhaluan nasionalis dan partai umat kristiani (Partai Murba, Partai Nasional Indonesia (PNI), Parkindo, Partai Katolik dan IPKI) bergabung atau disatukan dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di samping Golkar. Keberadaan PPP dan PDI masih diakui oleh pemerintah akan tetapi tetap dibatasi pergerakannya, sehingga tidak mendapat keluasaan dan sulit untuk berkembang sebagai partai yang mampu menggalang massa dan hanya sebatas partai kader saja (Aksa, 2012: 2). Sedangkan dari segi ideologi, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal, satu bentuk politik hegemoni ideologi dengan mewajibkan seluruh organisasi politik, sosial dan kemasyarakatan termasuk organisasi kemahasiswaan harus mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasinya.

Meskipun didominasi oleh ABRI, beberapa program pemerintah dianggap berhasil selama Orde Baru berkuasa, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan adanya stabilitas nasional. Akan tetapi, keberhasilannya tidak didapatkan secara mudah dan gratis, rezim Orde Baru membutuhkan ongkos yang sangat mahal karena terlambatnya kelompok sipil tampil dalam gelanggang percaturan politik. Walaupun sama-sama menggunakan militer sebagai penopang kekuasaan, rezim Orde Baru mempunyai orientasi yang berbeda dibanding rezim Orde Lama. Perbedaan itu setidaknya menurut O. H. Lee ada empat sifat antara lain; Pertama, Orde Baru mengutamakan prinsip keseragaman ideologi (menganut satu ideologi yang bersifat totalis), sedangkan Orde Lama mengedepankan keragaman ideologi dengan memayungi ideologi Nasionalis, Agama, Komunis (Nasakom). Kedua, Orde Baru mengendalikan satu partai tunggal (partai Golkar, yang awalnya dibentuk oleh sekretaris bersama dalam urusan pekerjaan) yang berkomitmen pada ideologi dan dipimpin oleh seorang diktator yang militeristik. Ketiga, Pembunuh misterius (petrus) dan polisi rahasia bebas berkeliaran di mana-mana, dan. Keempat, pengawasan di berbagai bidang yang bersifat monopolistik (Karim, 1999: 65-66).

Menguatnya peran ABRI disebabkan adanya sejumlah trauma ketidak-stabilan politik dalam pemerintahan yang dianggap berawal dari ketidakbecusan kalangan sipil dalam mengelola pemerintahan yang dimulai sejak masa perjuangan (1945-1949), Demokrasi Parlementer (1949-1959), sampai Demokrasi Terpimpin (1959-1966), yang pada gilirannya meruntuhkan rezim Orde Lama. Kecenderungan dominasi militer dibuktikan dengan adanya berbagai intervensi dalam lapangan politik, yang pada gilirannya hanya melahirkan suatu

pembusukan politik (politics decay) dan melahirkan suatu tipologi masyarakat pretorianistik (Shambazy, 1990: 64).

Rezim Orde Baru sangat anti instabilitas yang disebabkan oleh persoalan-persoalan traumatis yang ditinggalkan oleh rezim Orde Lama, diantaranya seperti Kasus DII/TII, G 30S atau Gestok, PRRI-Permesta, RMS, GAM. Atas alasan stabilitas dan keamanan nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan depolitisasi massa dengan mendudukkan militer dan birokrat pusat sebagai pemimpin politik formal di daerah (Gubernur, Bupati, Camat, bahkan sampai ke Desa melalui BABINSA). Demi stabilitas dan keamanan nasional, Rezim Orde Baru di bawah kendali Soeharto menginginkan Indonesia berada di bawah pengawasan militer. Karena itu, setiap daerah harus dikendalikan oleh militer termasuk daerah Kabupaten Bima.

Sebagai perpanjangan tangan dari rezim Orde Baru yang bercorak militer, pemerintah pusat mengutus seorang yang berpangkat Letnan Kolonel asal Jawa Timur untuk menjalankan roda pemerintahan di Bima. Pemerintah Kabupaten Bima mulai dikendalikan oleh militer dengan menjalankan sistem pemerintahan yang bergaya otoritarian dan militeristik. Sejak itulah, Kabupaten Bima secara berturut-turut dikendalikan oleh militer mulai dari Letkol H. Soeharmadji (1967-1974), Letkol H. M. Thohir (1974-1979), Letkol H. Umar Haroen (1979-1984 dan 1984-1989) dan Letkol H. Halim Djafar (1989-1994). Represifitas rezim Orde Baru telah melahirkan gerakan protes masyarakat Bima atas berbagai kebijakan yang cenderung diskriminatif, dan tentunya mengabaikan pembangunan di Bima.

Gejolak sosial yang terjadi di Bima pada masa Orde Baru adalah rangkaian pergolakan sosial dan politik yang melibatkan masyarakat Donggo. Gejolak sosial dalam "Peristiwa Donggo 1972" berawal dari serangkaian sikap dan kebijakan represifitas Letkol (Purn) Soeharmadji sebagai Kepala Daerah Bima yang militeristik dan cenderung diskriminatif. Dalam rangka mempertahankan status quo-nya, Letkol (Purn) Soeharmadji bersama A-B-G (ABRI-Birokrat-Golkar) melakukan politik hegemoni dan dominasi. Operasi Koter (Komando Teritorial) 1971 merupakan langkah strategis dari kalangan militer mengokohkan dominasinya di Dana Mbojo. Selain itu, perlakuan diskriminasi dialami oleh tokoh-tokoh Islam lokal di Dana Donggo yang telah meluapkan kemarahannya atas kaum minoritas (Umat Kristiani) di Desa Mbawa. Konflik horizontal dalam tahun 1969 hanyalah sentiment keagamaan yang dimainkan oleh umat Islam dengan memanfaatkan isu SARA.

Sementara tragedi "Pemilu Berdarah di Bajo, Donggo" berawal dari kekalahan Golkar dalam pesta demokrasi 1971. Sekber Golkar, karena merasa dipermalukan atas kekalahan Golkar kembali bertindak represif kepada elit-elit lokal yang memenangkan partai-partai Islam. Peristiwa ini memicu kemarahan Dou Donggo sehingga melahirkan tragedi berdarah di Dana Donggo. Represifitas rezim Orde Baru yang begitu massif di Bima, disetting sedemikian rupa oleh aktivis-aktivis asal Dana Donggo yang ada di jantung ibukota NKRI. Berangkat dari pokok

permasalahan tersebut, tulisan ini menjawab akar historis sebagai faktor penyebab munculnya gejolak sosial di Bima (1972) era Orde Baru.

Tulisan seputar Dou Donggo telah banyak dilakukan baik oleh para sejarawan dan antropolog barat maupun oleh sejarawan lokal di Bima. Beberapa di antaranya ditulis oleh Peter Just tentang Dou Donggo Justice: Conflict and Morality in an Indonesian Society. Hasil penelitian Peter Just mengemukakan tentang konsep keadilan dan moralitas yang berlaku dan diterapkan di kalangan Dou Donggo. Masyarakat Donggo melalui sebagai masyarakat desa yang jauh dari pusat pemerintahan dan Kota Bima telah menawarkan pendekatan inovatif untuk dalam memahami cara kerja hukum (adat) serta penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Peter Just mengemukakan bahwa operasionalisasi sistem hukum perlu dipahami sebagai basis ontologi moralnya. Ontologi dan komunitas moral menjadi dasar Dou Donggo dalam menjalankan ritus dan kultur berupa kepercayaan, kekerabatan maupun dalam sistem keadilan konsensualnya. Kerangka ini menjadi pandangan filosofi moral Dou Donggo yang mendasari sistem hukum yang berbeda dari jurisprudensi Barat (Just, 2000: 35).

Selanjutnya Rangga R. Ridha meneliti tentang Gerakan Sosial Masyarakat Donggo Tahun 1972: Kisah dari Elite-Elite yang Terkalahkan. Hasil penelitian untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian studi Strata Satu (S1) di Universitas Negeri Malang, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Rangga R. Ridha menjelaskan bahwa gejolak sosial tahun 1972 di Bima lahir dari kalangan petani dalam melawan represifitas, dominasi dan intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah atau rezim Orde Baru di Bima. Selain itu, ketidakadilan dan ketimpangan pembangunan menjadi penyebab yang ikut menyadarkan masyarakat Donggo dalam menggugat rezim yang berkuasa. Karena itu, melalui elit-elit lokal yang berasal dari Donggo, mereka mulai membangun kesadaran massa, dan melakukan gerakan protes sosial, puncaknya pada tanggal 22 Juni 1972. Peristiwa tersebut justru menjadi legitimasi bagi penguasa dalam melakukan represifitas di tengah masyarakat Donggo. Ancaman, teror, dan intimidasi juga eksekusi dirasakan langsung oleh masyarakat Donggo baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Bahkan elit-elit lokal yang mendesain gerakan sosial harus mendepak di balik jeruji besi.

Tulisan yang menjelaskan secara spesifik tentang gejolak sosial di Bima juga di tulis oleh Mustahid putra H. Kako sebagai salah satu elit lokal yang yang ikut berperan dalam gerakan tersebut. Mustahid menulis buku yang berjudul "Peristiwa Donggo di Pentas Nasional Tahun 1972: Mengungkap Peristiwa Penangkapan, Penyiksaan, dan Hukuman Semasa Orde Baru". Tulisan ini lebih memfokuskan pada peristiwa penangkapan, dan penyiksaan serta hukuman oleh pemerintah rezim Orde Baru pada elit-elit lokal yang menjadi aktor dalam gerakan protes sosial. Tulisan Mustahid jika dikaitkan dalam karakteristik ilmu sejarah, dapat dikategorikan sebagai karya sejarah serba subjektif. Subjektifitasnya dirasakan dalam tulisan yang memperlihatkan unsur subjektif melekat sebagai orang dalam. Selain H. Mustahid sebagai

putera H. Kako, salah satu elit penggerak dalam gerakan protes massa, H. Mustahid juga merupakan orang Donggo asli. Terlepas dari itu tulisan H. Mustahid H. Kako telah memberikan sumbangsih lebih bagi Dou Labo Dana (masyarakat dan daerahnya) terutama bagi sejarawan lokal dalam melanjutkan kajian-kajian kesejarahannya di daerah Bima. Ketiga tulisan di atas belum ada yang secara spesifik melihat akar historis sebagai penyebab munculnya gejolak sosial pada tahun 1972 di Bima. Oleh karena itu, tulisan ini hadir menjawab permasalahan pokoknya sekaligus mengungkap sisi pembeda dengan penelitian sebelumnya.

METODE

Jenis tulisan ini adalah tulisan sejarah, oleh karena itu metodologi yang digunakan mengikuti kerangka atau alur metodologis dalam disiplin ilmu sejarah. Alur atau kerangka metodologi dalam penelitian sejarah terdiri dari empat (4) tahapan antara lain: heuristik (pengumpulan data), kritik sumber yang terdiri dari kritik internal dan kritik eksternal, interpretasi data dan penulisan sejarah (historiografi). Pertama, pengumpulan data atau heuristik merupakan tahap awal dalam penelitian sejarah. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pelaku atau orang memahami alur sejarahnya secara langsung. Selain itu, data dikumpulkan melalui kajian dokumentasi dan kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengkaji data-data sejarah. Kedua, Kritik Sumber berguna dalam rangka memverifikasi data terkait kredibilitas, autentisitas, dan validitas atas data-data sejarah yang telah dikumpulkan. Dalam konteks ini, kritik sumber berguna menyaring data-data yang telah dikumpulkan dan relevansinya dengan peristiwa tersebut. Ketiga, Interpretasi untuk menarasikan, menganalisis, menghidupkan dan mensintesis data yang tersaring melalui kritik sumber dengan kecermatan, ketelitian, dan sedapat mungkin bersikap objektif (sikap menghindari subjektivitas) terhadap fakta sejarah. Oleh karena itu, interpretasi sangat berguna dalam mengimajinasikan kata-kata dengan tetap mengacu pada sumber-sumber sejarah yang ada. Keempat, Historiografi atau penulisan sejarah, karya sejarah yang dihasilkan dalam setiap diskursus akademik maupun hasil penelitian tidak hanya menggambarkan suatu peristiwa sejarah, tetapi juga menghasilkan makna dari peristiwa itu sendiri berdasarkan analisis historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Romantisme Dou Donggo Era Kesultanan Bima

Pada tahun 1950-1967, Jena Teke atau Putera Mahkota Abdul Kahir, diangkat menjadi kepala daerah Bima setelah kesultanan Bima berubah statusnya menjadi salah satu daerah swantara dan swapraja. Jena Teke merupakan seorang Putera Mahkota Kesultanan Bima sekaligus anak dari Sultan Muhammad Salahuddin. Pengangkatan Jena Teke sebagai kepala daerah tingkat II Kabupaten Bima, tentu berimplikasi kepada sistem dan struktur birokrasi kesultanan. Oleh karena itu, tata pemerintahan dalam bentuk kesultanan harus disesuaikan dengan sistem dan struktur birokrasi modern sebagaimana yang berkembang dan dijalankan

oleh pemerintah pusat. Penyesuaian sistem dan struktur baru dalam sistem birokrasi lama telah memicu keinginan dari elit-elit bangsawan lokal (raja-raja di setiap daerah) agar mendapat kedudukan dan posisi keistimewaan dan struktur birokrasi modern.

Naiknya Putera Abdul Kahir sebagai kepala daerah Bima merupakan hasil tuntutan keistimewaan dari kalangan bangsawan atas pengakuan dan bergabungnya Kesultanan Bima menjadi bagian dari NKRI. Meskipun demikian, tuntutan keistimewaan dari kalangan bangsawan mendapat tantangan dari masyarakat yang disuarakan melalui demonstrasi oleh kaum yang mengatas namakan sebagai kaum pergerakan (kalangan pergerakan modern) (Satriani, 2014: 41). Akibat adanya pertentangan antara kalangan bangsawan dengan kalangan pergerakan modern. Kalangan bangsawan diwakili oleh kalangan birokrasi-bangsawan dalam hal ini Sultan Bima yang didukung sepenuhnya oleh seluruh kalangan yang ada di pihak Kesultanan Bima. Sedangkan kalangan pergerakan modern diwakili oleh ulama dari kalangan modernis Islam terutama dari Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) (Haris dalam Satriani, 2014: 41).

Pertentangan antara kalangan bangsawan dengan kalangan pergerakan modern membawa implikasi dengan terbelahnya masyarakat ke dalam dua kubu yang pro dan kontra dengan pemerintah. Pembelahan masyarakat inilah yang semakin memperuncing pertentangan antara elit bangsawan dengan elit agamawan. Masuknya Putera Abdul Kahir dalam struktur birokrasi pemerintahan Indonesia sejak tahun 1950 adalah wujud dari keberhasilan bangsawan lokal dalam mempertahankan kekuasaannya. Sementara pada sisi yang lain hal tersebut adalah bagian dari strategi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah proses 'peleburan' Kesultanan Bima dalam wilayah Indonesia. Kekuasaan elite bangsawan dalam struktur pemerintahan Indonesia hanya bertahan hingga tahun 1967 (Thubany, 2005: 67). Setelah itu, Indonesia memasuki Era Baru yang populer disebut sebagai Era Orde Baru.

Peta kekuasaan dan perpolitikan Indonesia berubah setelah memasuki babak baru dalam Era Orde Baru. Kekuasaan pemerintah dari pusat hingga ke daerah berada dalam satu komando yang dikendalikan oleh militer. Orde Baru mungkin bukan termasuk rezim totaliter yang absolut, tapi sebuah rezim otoriter karena masih membiarkan adanya partisipasi politik pada tingkat paling rendah, umumnya disebut dengan pseudo participation. Pemilu-pemilu di masa Orde Baru bersifat semu; demokrasi yang diterapkan hanya procedural saja dan mengabaikan aspek substantif berupa jaminan civil rights. Singkatnya, demokrasi yang sedang berlangsung saat itu sebenarnya adalah pemusatan kekuasaan secara akumulatif pada diri Presiden Soeharto.

Ada dua cara menjelaskan fenomena tersebut, menurut Fattah, (1994: 215), pertama, dari sisi kultur politik yaitu, terjadi paralelisme historis antara raja Jawa dan Presiden Orde Baru. Artinya, rezim Orde Baru mengembangkan kultur Jawa dalam menjalankan kekuasaan,

yang memandang kekuasaan secara monopolistik, tidak mengenal pembagian, dan anti kritik atau anti oposisi yang dianggap sebagai budaya Barat. Kedua, struktur politik yang dibangun, menempatkan Presiden Soeharto dalam tiga posisi sentral, yaitu: sebagai Ketua Dewan Pembina Golongan Karya (Golkar), Panglima Tertinggi ABRI yang berdwifungsi, dan sebagai kepala eksekutif sekaligus. Demi mendukung stabilitas dan keamanan nasional, rezim Orde baru mengeluarkan kebijakan 'depolitisasi' massa dengan mendudukkan militer dan birokrat pusat sebagai pemimpin politik formal di daerah. Dominasi militer dan birokrat yang di tempatkan pemerintah mendapatkan resistensi dari masyarakat Bima (Satriani, 2014: 42).

Gerakan sosial yang terjadi di Bima 1972 oleh masyarakat dari Donggo adalah salah satu gerakan protes dari rezim Orde Baru di Bima. Dou Donggo karena dianaktirikan oleh Bupati Bima saat itu, menuntut mundur Letkol Soeharmadji yang kurang peduli dengan pembangunan daerah terutama di Dana Donggo. Mereka menuntut agar Jena Teke Putera Abdul Kahir diangkat kembali sebagai Bupati Bima, seperti yang tertuang dalam spanduk saat Dou Donggo melakukan Long March tanggal 22 Juni 1972 yang berisi tuntutan: "Soeharmadji Segera Pulang", "Putra Kahir Harus Jadi Bupati Bima", "Kami Datang Mencari Perdamaian", "Kami Tidak Mengganggu" "Demi Putra Kahir Segala Kemungkinan Kami Hadapi". Sifat antipati yang diperlihatkan oleh Donggo melalui spanduk dalam aksi Long March adalah bentuk kekecewaannya atas rezim Soeharmadji yang hanya berkuasa untuk meraup keuntungan materil semata. Bahkan dalam "Petisi Sepuluh" yang dikeluarkan oleh Sepuluh elite-elite dari Donggo yaitu antara lain; Jamaluddin H. Yasin, H. Abas H. Oya BA, H. M. Ali Taamin, KH. Abdul Madjid Bakry, H. Kako Bungko, H. M. Ali Arsyad, Ahmad Natsir, Yakub Dode, H. M. Amin Umar dan Muhammad Nor Sulaiman. Dalam Petisi Sepuluh menyatakan "Mendesak Bupati Bima Letkol (Purn) TNI AD Soeharmadji agar turun dari jabatannya. Apabila Soeharmadji tidak mau turun dari jabatan Bupati, maka Bima akan menjadi perkuburan massal rakyat Kabupaten Bima" (Baca Lampiran dalam Kako dan La Nora, 2017: 252).

Selama menjadi Bupati Bima sejak tahun 1967 sampai tahun 1974, pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di Bima selalu diabaikan. Soeharmadji juga cenderung mengabaikan pendekatan yang bersifat sosial kultural dalam menanggapi setiap masalah yang dihadapi dengan masyarakat Bima, dan cenderung bertindak represif-otoritarian dan militeristik. Selain itu, gerakan protes sosial yang pelopori oleh Dou Donggo yang ingin mengembalikan Putera Abdul Kahir sebagai Bupati Bima adalah bentuk romantisme masa lalu Dou Donggo dengan beberapa Sultan yang pernah bertahta di Kesultanan Bima.

Kedekatan Sultan Bima dengan masyarakat Donggo dari sejak Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima ke-14) yang dilanjutkan oleh Jena Teke Abdul Kahir II (Putera Sultan Muhammad Salahuddin) selalu terjalin dengan baik. Bahkan masyarakat Donggo dan daerah Donggo menjadi tempat perlindungan terbaik bagi Jena Teke Abdul Kahir II (Sultan Bima ke XV)

ketika Jena Teke mendapat sorotan dari rakyatnya atau gugatan masa di Dana Mbojo. Sebagaimana yang terjadi ketika beberapa pimpinan partai politik yang mengarahkan kekuatan massa ke Istana Kesultanan Bima. Massa mengadakan demonstrasi besar-besaran menuntut pembubaran status Dana Mbojo dari sistem Kesultanan menjadi sistem Swapraja. Dalam suasana genting seperti itulah, Jena Teke Abdul Kahir II (Sultan Bima XV) memilih daerah Kecamatan Donggo (tepatnya di Pasanggerahan Desa O'o) sebagai tempat pengendalian sementara pemerintahan kesultanan selama 6 (enam) bulan berlangsung.

Berlindungnya Jena Teke Abdul Kahir II di Dana Donggo, menjadi penting bagi pengendali kekuasaan selanjutnya. Hal tersebut, dapat dibaca dari sikap H. Idris Jafar sebagai Kepala Swapraja Bima tahun 1961-1968. H. Idris Jafar merupakan orang yang kali pertama yang mau menggantikan nama Kecamatan Donggo menjadi Kecamatan Bolo Baru, atas usulan partai politik waktu itu yakni PIR, PNI, dan Masyumi. Usulan ini ditolak oleh masyarakat Donggo dengan melakukan demonstrasi ke Kantor Swapraja Bima. Bagi masyarakat Donggo, Merubah nama Donggo sama halnya pemerintah berupaya menghilangkan nilai historis dan sosio-kultur Dou Donggo. Perubahan nama tersebut, tentu menimbulkan sentimen geografis kewilayahan, karena orang-orang pesisir tidak akan menempatkan diri sebagai orang Donggo. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik dalam mengklaim wilayah kekuasaan dan benturan budaya antara masyarakat Donggo bagian atas dengan masyarakat Donggo yang mendiami pesisir pantai di sebelah barat teluk Bima (La Nora, 2008: 119-121). Bagi masyarakat Donggo, bukan perubahan nama yang diinginkan oleh masyarakatnya, melainkan peran dan kebijakan serta usaha nyata pemerintah yang dapat memajukan pendidikan, perkebunan, peternakan dan pertanian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Donggo. Pengabaian pembangunan oleh pemerintah sebagai pengendali kekuasaan di Dana Mbojo terus berlanjut, sehingga mengundang kemarahan Dou Donggo di Era kepemimpinan Letkol AD. Soeharmadji. Kondisi yang dirasakan oleh Dou Donggo demikian, berbeda dengan yang dialaminya pada masa-masa Sultan Bima.

Sultan Bima sebagai Hawo Ro Ninu (pengayom dan pelindung) mengerti betul keinginan dan harapan masyarakat, begitu pula dengan masyarakatnya sebagai Ada Ro Dou (rakyat di pimpinnya), Dou Donggo selalu berkontribusi dalam membangun daerah Bima dari sejak bercokolnya Belanda di Dana Mbojo dengan sistem imperialisme dan kolonialisme hingga masa sekarang. Kerinduan Dou Donggo akan kenangan indah hidup seperti di masa-masa Sultan Bima inilah menjadi salah satu alasan Dou Donggo bertindak dan bergerak menggugat rezim Soeharmadji yang dinilainya diskriminatif dan berkuasa sekedar meraih keuntungan materil semata. Rezim Soeharmadji juga kurang tidak melakukan pendekatan sosial kultural yang lebih terbuka dalam menghadapi masalah dengan Dou Mbojo termasuk Dou Donggo.

IPMDB-Jakarta Mendesain Gerakan Sosial

Gerakan sosial yang terjadi di daerah Bima tahun 1972, selain karena adanya beberapa peristiwa yang melatari sebelumnya, juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan IPMDB yang berada di Jakarta. IPMDB-Jakarta merupakan akronim dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Donggo Bima-Jakarta. Organisasi IPMDB-Jakarta hadir karena panggilan jiwa bersama dalam merekatkan ikatan persaudaraan, menjalin rasa solidaritas, memperlancar komunikasi dan menjaga kekeluargaan antar sesama etnis Donggo yang ada di Kota Jakarta. Karena itu, organisasi ini didirikan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 16 Maret 1968. Berdirinya organisasi IPMDB-Jakarta pada awalnya dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi keummatan dan kebangsaan di Indonesia khususnya yang sedang terjadi di daerah Kabupaten Bima. Kondisi keummatan di Bima sekitar tahun 1969 mengalami gejala kristalisasi ideologi sebagai akibat dari rentetan sejarah revivalisme Islam di Indonesia.

Munculnya isu-isu seperti formalisasi syari'at Islam oleh ulama-ulama dalam musyawarah ummat Islam di Dana Mbojo, menginspirasi generasi Donggo di Jakarta guna membentuk sebuah organisasi dalam membina generasi muda Islam asal etnis Donggo. Drs. Eddy A. Hamid Hasan, Hamzah Hasan, Bc.HK, A. Rahman Yasbi, Abdul Gani Zain dan Yahya Usman adalah generasi awal yang menginisiasi berdirinya IPMDB-Jakarta. Terbentuknya tim formatur dalam rapat perdana tanggal 16 Maret 1968 di Jalan Palmerah Utama No. 80 Jakarta Barat (kediaman Eddy A. Hamid Hasan) sekaligus melahirkan struktur kepengurusan DPP IPMDB-Jakarta. Ketiga tim formatus juga bertugas menyiapkan segala persiapan dengan membagi tugas masing-masing. Hamzah Hasan bertugas menyusun konsep Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), A. Rahman Yasbi bertugas membuat stempel dan mencetak logo dan Eddy A. Hamid Hasan bertugas mendesain konsep logo dan menyusun kelengkapan administrasi dan persuratan. Setelah semuanya rampung maka diadakanlah rapat pleno pengesahan pengurus dan menyusun program kerja tanggal 21 maret 1968. Selanjutnya rapat paripurna untuk membahas dan mengesahkan AD/ART dilaksanakan di rumah Abdul Gani Zain tanggal 10 April 1968.

Kehadiran organisasi ini menjadi wadah perjuangan dan pergerakan serta tempat berhimpunnya pemuda dan mahasiswa Bima yang beretnis Donggo di Jakarta. Ajaran dan nilai-nilai Islam menjadi prinsip utama yang menjadi pegangan mereka dalam berhimpun. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam lambang IPMDB-Jakarta di bagian bulan sabit yang bertuliskan Lajnah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar sekaligus menjadi motto organisasinya. Lajnah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar artinya mengajak atau menyerukan orang untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemungkaran.

Motto IPMDB-Jakarta bukanlah sekedar hiasan kata yang terpampang di bagian lambang organisasi semata. Motto tentunya dipilih atas pengkajian, penghayatan dan pemaknaan para pencetus organisasi, dengan harapan agar lima kata yang dituliskan dalam motto dan lambang

organisasinya menjadi spirit pergerakan dan roh perjuangan IPMDB-Jakarta. Lajnah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar atau perintah menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran telah banyak difirmankan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Allah SWT telah berfirman yang artinya; "Dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-NYA. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkara lagi maha bijaksana" (Q.S At-Taubah: 71).

Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran sejatinya telah menjadi prinsip hidup bagi setiap kaum muslim. Oleh karena itu, spirit Lajnah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar bagi IPMDB-Jakarta menjadi kontrol diri dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam firmanya yang artinya "Dan hendaklah ada diantara kamu orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung" (Q.S. Ali Imran: 104). Perintah amar ma'ruf (menyerukan kepada kebajikan) selalu disandingkan dengan nahi mungkar (mencegah dari kemungkaran). Ini menandakan bahwa perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar harus berjalan beriringan sebagai ciri umat terbaik sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran yang berbunyi: "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Sebagian diantara mereka ada orang-orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik" (Q.S Ali Imran: 110).

Selain ketiga ayat di atas, tentunya masih banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an yang telah menguraikan pentingnya menjalankan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Beberapa diantaranya terdapat dalam Q.S. Ali Imran: 113-114, Q.S. Al-A'raf: 165, Q.S. At-Taubah: 112 dan 122, Q.S. An-Nahl: 90 dan 125, Q.S. Maryam: 39, Q.S. Thaha: 132, Q.S. Al-Hajj: 41 dan 46, Q.S. Al-Furqan: 52, Q.S. As-Syuara: 214, Q.S. Al-Qasas: 86-87, Q.S. Al-Ankabut: 46, dan Q.S. Lukman: 17. Selain perintah Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an juga terdapat dalam Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya menyampaikan "Barangsiapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan (tindakan atau kekuasaan)nya, barangsiapa tidak mampu melakukan, maka hendaklah ia merubahnya dengan lisannya. Barangsiapa yang tidak mampu melaksanakannya, maka hendaklah ia mengubah dengan hatinya; Dan yang terakhir itulah lemah-lemahnya iman" (HR. Muslim). Masih banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an dan hadis-hadis sahih selain mengajak amar ma'ruf nahi mungkar juga menjelaskan seputar perintah berdakwah, menyeru kepada Agama Allah dan memberi peringatan.

Pesan-pesan “amar ma’ruf nahi mungkar” dalam teks suci diterjemahkan secara sederhana oleh IPMDB-Jakarta dalam berbagai bentuk perjuangan dan gerakan. Bagi IPMDB-Jakarta, perintah amar ma’ruf telah dijewantahkan dalam bentuk aktivitas nyata baik dalam bentuk dakwah maupun dalam bentuk aksi sosial. IPMDB-Jakarta mengontekstualisasi teks-teks tersebut dengan mentradisikan diskusi-diskusi ilmiah dan pengajian seputar keagamaan. Masjid dan Mushola selain berfungsi sebagai tempat ibadah shalat, juga dijadikan sebagai tempat pengajian. Masjid Nurul Amal Palmerah dan Mushola Al-Mukarram Kembangan Timur sering dijadikan sebagai tempat pengajian anggota IPMDB-Jakarta. Basis perjuangannya tidak saja memfokuskan diri dalam Masjid dan Mushola, Arena-arena di sekitar Kota Jakarta seperti Taman, Kampus, maupun warung-warung kopi kerap dijadikan sebagai tempat pertemuan ide-ide segar, wacana-wacana kritis terutama dalam merespon berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia khususnya di Bima.

Dalam usaha membangun jejaring sosial, komunikasi dan interaksi dengan berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan, IPMDB-Jakarta harus bersinergi dengan organisasi-organisasi lain terutama dengan organisasi yang berhaluan Islam. Organisasi sosial pemuda, kemahasiswaan dan kemasyarakatan yang sering berinteraksi dengan IPMDB-Jakarta diantaranya seperti Pelajar Islam Indonesia (PII) di kalangan pelajar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di kalangan mahasiswa, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) di kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa dan Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama (NU). Kehadiran Muhammadiyah di Indonesia yang bergerak di bidang sosial, agama, pendidikan dan kebudayaan menjadi salah satu alasan IPMDB-Jakarta selalu berkonsultasi seputar kegiatan sosial dan keagamaan. Selain organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan, mereka juga selalu berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi Dakwah Islamiyah (PTDI).

Dalam beberapa peristiwa besar di Jakarta, IPMDB-Jakarta tidak pernah absen mengkritisi berbagai kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh rezim Orde Baru. Beberapa kebijakan rezim Orde Baru yang pernah di protes oleh IPMDB-Jakarta antara lain, pertama; penghancuran Gereja di Slipi Jakarta Barat dan pengrusakan Kompleks Pelacuran Pejompongan Jakarta Pusats pada tahun 1969. Kedua; Bergabung dengan PII melakukan aksi tahun 1973 terkait penolakan atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta. Ketiga; melakukan aksi atas Kecurangan dalam pemilu tahun 1971 dan 1977. Keempat; Kasus peledakan Bank BCA tahun 1984 di Harco Glodok, Pacenongan Jakarta Pusat. Kelima; Terjadikan kasus peledakan BOM Molotov tahun 1978 sebagai respon atas represifitas rezim terhadap ulama dan ummat Islam.

Keberadaan IPMDB-Jakarta dan kaitannya dengan peristiwa Donggo 1972, tidak bisa dilepaskan dari peran serta aktivis-aktivis IPMDB-Jakarta dalam merespon berbagai persoalan yang terjadi di Dana Mbojo. Terbangunnya komunikasi yang intens antara aktivis IPMDB-Jakarta dengan masyarakat Donggo yang ada di daerah Bima, memudahkan mereka dalam mendapatkan informasi dan kondisi daerah Bima. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan di Kecamatan Donggo sejak naiknya rezim Orde Baru di Bima, belum tersentuh sama sekali. Kecamatan Donggo masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kecamatan-kacamatan lain yang ada di Kabupaten Bima. Akses jalanan menuju Kecamatan Donggo belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, Listrik Negara belum ada sama sekali yang masuk di Kecamatan Donggo, pembangunan infrastruktur lainnya pun belum tersentuh sama sekali baik di bidang pendidikan, fasilitas kesehatan dan bantuan obat-obatan untuk meningkatkan produksi dan hasil pertanian serta kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan.

Kondisi demikian mendorong tokoh-tokoh Donggo di Jakarta (tokoh-tokoh yang memprakarsai berdirinya IPMDB-Jakarta) melakukan survei sekaligus memantau langsung keadaan pembangunan di Dana Donggo. Aktivis IPMDB-Jakarta yang diwakili oleh Eddy A. Hamid Hasan dan Hamzah Hasan mengadakan pertemuan di Desa O'o dengan keluarga besar Dou Donggo yang berlangsung pada tanggal 1 November 1969. Di tengah khidmatnya pertemuan, Dou Donggo dikejutkan sikap dan cara Abdullah, BA (Camat Donggo) yang melakukan penganiayaan terhadap pelaku perladangan liar di Donggo. Kesewenangan camat terhadap masyarakat Donggo mengundang kemarahan Hamzah Hasan. Karena tidak terima dengan perlakuan Camat Donggo, Hamzah Hasan langsung mencekir lehernya Abdullah BA. Keberanian Hamzah Hasan dalam melawan Camat Donggo, menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah yang berkuasa di daerah Bima.

Hasil pertemuan dengan masyarakat Donggo tanggal 1 November 1969 dievaluasi kembali oleh pengurus IPMDB-Jakarta setelah keduanya kembali ke Ibukota sebagai basis gerakannya. Setelah melihat langsung kondisi Dou Labo Dana Donggo. Dari pusat ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, IPMDB memantau perkembangan situasi dengan menjadikan organisasi ini sebagai perantara antara komunikasi dan jaringan dari aktivis Donggo di Jakarta dengan masyarakat Donggo yang ada di Bima. Hubungan komunikasi masyarakat Donggo yang bernaung di bawah organisasi IPMDB-Jakarta dengan semua elemen masyarakat Donggo di Kabupaten Bima terus berlangsung. Semua kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif dan dapat merugikan masyarakat selalu termonitor, bahkan untuk menjaring informasi yang bersifat strategis seputar kondisi aktual di Bima, IPMDB-Jakarta membentuk Ikatan Pelajar Mahasiswa Donggo (IPMD Cabang Bima) yang saat itu diketuai oleh Abdul Wahab (Kako dan La Nora, 2017: 136)

IPMDB-Jakarta mulai menyusun agenda dan rencana strategis dalam meresponnya. Pada tahun 1971, DPP-IPMDB-Jakarta berusaha untuk menambah data-data tambahan seputar kebijakan pemerintah dan keadaan pembangunan di Dana Mbojo. Salah satu cara mendapatkan informasi akurat yaitu dengan mengutus anggotanya yang bernama Abas Oya, BA untuk memeriksa secara langsung keadaan berdasarkan laporan tokoh-tokoh Donggo atas berbagai ketimpangan pembangunan di Bima di bawah kendali Letkol Soeharmadji. Abas Oya, BA berangkat ke Bima dengan menggunakan kapal kayu "Bidara". Kapal yang ditumpangnya sempat mau berlabuh di teluk kawasan hutan jati Tololai Kecamatan Wera. Namun, karena di sana ada satu kapal kayu yang berencana mengangkut kayu jati tapi terdampar akhirnya Kapal Kayu Bidara berlabung ke Pelabuhan Tanjung Bima.

Pengangkutan kayu jati secara legal dari Tololai Kecamatan Wera ke daerah Jawa seakan berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan informasi dari sejumlah pejabat Setwilda Kabupaten Bima maupun pantauan langsung oleh masyarakat Bima, rupanya eksploitasi kayu jati direstui langsung oleh Bupati Bima sendiri. Kerakusan Letkol Soeharmadji dalam mengerus kekayaan di Dana Mbojo tidak sebatas eksploitasi kayu jati saja, Bupati Bima juga menjual sebagian halaman Museum "ASI" Mbojo serta hilangnya beberapa benda-benda pusaka di dalam ASI berupa keris bersarung emas dan tombak pusaka Sultan Bima. Soeharmadji sebagai penguasa rezim Orde Baru di Bima hidup bergelimangan harta dari hasil eksploitasi dan kekayaan alam di Bima, sementara di satu sisi, dia mengabaikan berbagai pembangunan di daerah tempatnya berkuasa. Abas Oya BA setelah mendapatkan informasi terkait kondisi daerah Bima, kembali ke Jakarta dan membahas hasil pemantauannya selama berada di Bima.

Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari anggota dan pengurus, maka disepakatilah bahwa salah satu aktivis IPMDB-Jakarta harus turun langsung ke lapangan dalam menanamkan kesadaran massa. Oleh karena itu, Abas Oya BA diutus khusus oleh DPP IPMDB-Jakarta untuk mendesain gerakan sosial (aksi massa) dalam menuntut berbagai kebijakan rezim Orde Baru di Bima. Mengingat Abas Oya adalah orang yang tahu betul kondisi Bima di antara beberapa pengurus IPMDB-Jakarta saat itu. Mosi ketidakpercayaan aktivis yang beretnis Donggo di Jakarta merupakan salah satu rentetan kekecewaan masyarakat Bima secara umum. Salah satu penyebabnya karena adanya kebijakan politik rezim Orde Baru di Bima yang cenderung mengabaikan pembangunan di Kecamatan Donggo baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya maupun di bidang politik.

Gejolak sosial yang pernah terjadi di Bima tahun 1971 Era Orde Baru, merupakan ekspresi kekecewaan Dou Donggo dari berbagai perlakuan diskriminatif pemerintah yang dimaksud. Karena itu, Dou Donggo yang tersadarkan oleh keadaan sosial dan situasi politik 'menggugat' Bupati Bima yang terlena dengan kekuasaan tetapi tidak memperdulikan deritan yang di alami oleh kalangan masyarakat bawah. Masyarakat Donggo mulai membangun opini

publik, menggalang massa, mendesain gerakan dan menggerakkan massa menuntut keadilan dan meminta Letkol (Purn) Soeharmadji turun dari jabatannya sebagai Bupati Bima serta angkat kaki dari Dana Mbojo. Tuntunan Dou Donggo dalam aksi massa tanggal 22 Juni 1972 merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat selama Soeharmadji berkuasa di Dana Mbojo.

Berdasarkan hasil wawancara Subari dengan H. Abas Oya BA, seorang tokoh intelektual yang diutus oleh IPMDB-Jakarta tanggal 16 Februari 2017. H. Abas Oya BA menjelaskan bahwa salah satu hal yang melatar-belakangi terjadinya gejolak sosial karena adanya harapan dari masyarakat Donggo membuat kebijakan politik secara tertulis kepada rezim Soeharmadji untuk membangun sarana dan prasarana umum. Beberapa diantaranya dengan mengaspalkan semua jalan di Kecamatan Donggo sebagai penunjang kelancaran arus transportasi dan sektor ekonomi masyarakat. Melalui Dinas Pertanian, Soeharmadji berjanji akan memberikan bantuan bibit padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya (Subari, 2017: 56). Melalui Dinas Perkebunan, pemerintah memberikan bantuan bibit mangga, nangka dan kelapa untuk ditanam disepanjang pantai yang dimulai dari Desa Bajo, Punti, Sowa, Sa'i dan Desa Sampungu yang memiliki garis pantai di selat Bima. Sedangkan Dinas Kehutanan Kabupaten Bima akan memberikan bantuan bibit jati untuk mengadakan reboisasi terhadap hutan yang gundul. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Bima membangun tempat ibadah bagi umat Islam di Desa O'O Pusat Kecamatan Donggo (Subari & Anwar, 2021)

Hadirnya salah satu aktivis IPMDB-Jakarta dalam mendesain gerakan massa di Dana Donggo, telah membangkitkan kesadaran kolektif di kalangan Dou Donggo. Abas Oya menjadi representasi tokoh intelektual di kalangan Dou Donggo dalam memelopori gerakan sosial di Bima. Abas Oya terlibat langsung dalam membangun opini publik, membangkitkan kesadaran massa, merumuskan tujuan gerakan serta menjadi massa aksi. Selain mengutus Abas Oya, IPMDB-Jakarta juga intens dalam memonitor setiap rencana dan akvitas massa. Kritikan-kritikan aktivis Donggo yang bergabung dalam IPMDB-Jakarta atas kebijakan dan represifitas rezim di Dana Mbojo terus menggema di jantung ibukota NKRI. Mereka tidak ketinggalan dalam merespon berbagai kebijakan rezim Orde Baru, terutama terkait kasus yang menimpa lima tokoh pasca peristiwa 1972 di Bima.

Karena sikap kritisnya dalam menanggapi berbagai persoalan yang menimpa anak bangsa terutama di Dana Mbojo, IPMDB melalui buletinnya menerbitkan tulisan-tulisan yang berisi seputar kebijakan pemerintah khususnya di Bima yang berjalan pincang. Kritikan-kritikan pedas oleh Mahasiswa Donggo Bima di Jakarta yang bergabung dalam IPMDB, menjadi perhatian serius ABRI. Melalui Kapuspen ABRI pusat, DPP IPMDB Jakarta di proses terkait dengan keterlibatannya dalam mendesain gerakan sosial di Bima. Dua bulan setelah gerakan sosial yang sempat menggegerkan Bumi Gora (NTB) dan secara umum Indonesia bagian Timur tersebut, pengurus IPMDB di panggil oleh Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

(KOPKAMTIB) Pusat Brigjen Tahir tanggal 16 Agustus 1972. Nama-nama yang diapanggil diantara pengurus IPMDB Jakarta antara lain; H. Hamzah Hasan. Sm. Hk (Pembina/Penasehat DDP IPMDB), Edy A Hamid Hasan, SE (Ketua Umum DPP-IPMDB), Dr. Rasyid S, SH dan Anas Muzakir. Mereka diperiksa bersarkan surat panggilan dengan Nomor 3 Pang.05/Teperpu/8/1972, di Jalan Merdeka Barat Nomor 14 Jakarta. Terkait keterlibatannya dalam gerakan sosial di Bima 1972, keempat pengurus termasuk dewan Pembina IPMDB Jakarta diintrogasi dan di proses selama tiga hari mulai 16 hingga 20 agustus 1972 di Markas oleh Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) Pusat (Kako dan La Nora, 2008: 143-144).

KESIMPULAN

Romantisme Dou Donggo dengan Sultan Muhammad Salahuddin di Kesultanan Bima terutama dengan Jena Teke (Putera Mahkota Abul Kahir II) menjadi satu alasan bagi masyarakat dalam membaca arah dan kebijakan pemerintah saat itu. Sebelum berkuasanya rezim Orde baru yang sangat sentralistis, otoriterian dan militer. daerah Bima di pimpin oleh keturunan Sultan yang berkuasa secara turun temurun di wilayah Kesultanan Bima. Muhammad Salahuddin Sultan Bima terakhir dan Sultan Abdul Kahir sebagai putra mahkota telah mecurahkan perhatian dalam membangun daerah Bima dengan pendekatan kultural dan struktural. Hubungan yang terjalin baik antara Dou Donggo dengan pihak pemerintah di daerah Bima justru tidak dihadirkan dalam pemerintahan baru di bawah kendali Orde Baru. Rezim Orde baru menjadi babak bagi sistem pemerintah saat itu, kepala-kepala daerah merupakan hasil sirkulasi kekuasaan dari pusat yang cenderung mendikte keadaan masyarakat.

Selain, romantisme Dou Donggo dengan Sultan Bima terakhir, gejolak sosial muncul karena adanya kesadaran kolektif dari leit-elit lokal, baik yang mendiami daerah Donggo maupun yang merantau di daerah Jakarta. Posisi Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi strategis bagi aktor-aktor intelektual yang berasal dari Donggo dalam mengkaji isu-isu aktual baik yang sedang terjadi di Ibu Kota maupun di Bima sebagai daerah kelahirannya. Ketimpangan pembangunan di Bima, represitas rezim yang berkuasa membangkitkan kesadaran mereka dalam merespon isu-isu actual yang terjadi di Bima. Para aktor intelektual mulai membangun kesadaran massa dan mendesain gerakan yang memicu lahirnya gejolak sosial pucaknya pada tanggal 22 Juni 1972 di daerah Bima.

REFERENSI

- Abdullah, Taufik & A. B. Lopian. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah VII: Pasca Revolusi. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Aksa. 2012. Dualisme dalam Tubuh HMI: Studi Tentang Perpecahan HMI Terhadap Penerapan Azas Tunggal Pancasila (1978-1998). Skripsi. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

- Boland, B. J. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*. Jakarta: PT. Grafiti Pers.
- Crouch, Harold. 1978. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca. Cornell University Press.
- Fatah, Eep Saefullah. 1998. *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin (ed). 2010. *Mengenal Tuan Guru Imam Haji Abdurrahman Idris*. Bima: Pustaka Darul Hikmah.
- Haryono. 2012. *Militer dalam Politik*, dalam Abdullah, Taufik & A. B. Lopian. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah VII: Pasca Revolusi*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Just, Peter. 2000. *Dou Donggo Justice: Conflict and Morality in an Indonesian Society*: Rowman & Little field Publishers.
- Kako, Mustahid H. dan La Nora, Ghazaly Ama. 2017. *Peristiwa Donggo 1972: Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru*. Mataram: PT. Suara Niaga Nusantara (Lombok Post Group).
- Kako, Mustahid H. 2013. *Peristiwa Donggo di Pentas Nasional Tahun 1972: Mengungkap Peristiwa Penangkapan, Penyiksaan, dan Hukuman Semasa Orde Baru*. Mataram: Lombok Post.
- Karim, Rusli. 1999. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rangga R, Ridha. 2011. *Gerakan Sosial Masyarakat Donggo Tahun 1972: Kisah Elit-Elit Terkalahkan*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Said, Salim. 1992. *Genesis of Power, General Sudirman and The Indonesian Military in Politics 1945-1945*. Singapura-Jakarta: ISEAS-Pustaka Sinar Harapan.
- Satriani, Septi. 2014. *Dinamika Peran Elit Lokal dalam Pilkada Bima 2010*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Shambazy, Budiarto. 1990. 'Sipil dan Militer: Siapa Harus Lebih Dominan' dalam Menuju Masyarakat Baru Indonesia: Antisipasi Terhadap Tantangan Abad XXI. Jakarta: Gramedia.
- Subari. 2017. *Pergolakan Politik di Bima Pada Masa Orde Baru: Peristiwa Donggo 1972*. Tesis. Makassar: PPs Universitas Negeri Makassar.
- Subari, S., & Anwar, A. (2021). Hegemoni Elit-Elit Lokal Donggo dalam Membangun Gerakan Sosial di Bima Tahun 1972. *Yupa: Historical Studies Journal*, 5(2), 91-100.
- Thubany, Syamsul Hadi. 2005. *Pilkada Bima 2005: Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia*. NTB: Bina Swagiri-Fitra Tuban-Salut NTB Kemitraan.